

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan komponen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Penyusunan laporan keuangan merupakan suatu proses tata keuangan yang telah mengalami kemajuan sistem keuangan yang lebih modern. **Penerapan akuntabilitas publik sebagai bentuk kewajiban pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah<sup>1</sup>.** Setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawabannya, karena meningkatnya tuntutan masyarakat dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparansi.

Laporan keuangan dikatakan andal (*reliable*) jika laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material dan disajikan secara tulus dan jujur. Pelaporan keuangan yang andal apabila dalam penyajiannya terdapat fakta-fakta secara jujur dan relevan serta dapat diverifikasi atau proses menentukan kebenaran laporan keuangan. Agar informasi dapat

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia. 2014. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014. Jakarta

diandalkan maka informasi tersebut harus disajikan dengan jujur, substansial, dapat dijadikan sebagai pertimbangan sehat, dan netral (harmony.com).

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Undang- Undang Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 101 tentang pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa kepala daerah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) berupa laporan keuangan yang diperiksa oleh Badan pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah, penyajian laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) agar dapat menyediakan informasi yang andal mengenai seluruh transaksi yang dilakukan entitas pelaporan selama periode pelaporan. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan acuan dalam penyusunan laporan keuangan yang mempunyai kekuatan hukum dalam meningkatkan kualitas dengan tingkat keandalan laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ditetapkan dalam peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Fungsi pelaporan keuangan harus menyajikan informasi keuangan yang andal sehingga laporan keuangan tersebut dapat sebagai pengambilan keputusan dalam mengalokasikan dana.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena kualitas laporan keuangan pemerintah daerah masih rendah. Hal tersebut dikemukakan oleh ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintah Daerah masih lamban

dalam mengejar kualitas laporan keuangannya. Ternyata didalam laporan keuangan masih banyak disajikan data yang tidak sesuai. Selain itu masih banyak penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintahan (Desiana, 2004). Penilaian tersebut didasarkan fakta masih sedikitnya pemerintah daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan laporan keuangan ialah sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern merupakan prosedur mekanis untuk memeriksa ketelitian data. Dengan adanya sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara menyeluruh dalam pemerintahan dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian Yanto (2019) menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap keandalan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan.

Pengawasan berfungsi untuk menghindari perilaku pejabat yang mengelolan keuangan negara dari ketidak jujuran, penyelewengan, kebocoran anggaran. Dengan adanya pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan, maka penyajian laporan keuangan dapat memenuhi karakteristik kualitatif pokok yaitu keandalan. Berdasarkan tabel anti image matrices, nilai MSA pengawasan keuangan daerah sebesar 0.807. Nilai ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah lebih besar dari 0.5, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap keandalan nilai informasi

pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pengawasan keuangan daerah dilaksanakan untuk menjamin agar kegiatan pemerintah tidak menyimpang dari tujuan dan rencana yang telah ditetapkan pengawasan keuangan daerah berfungsi untuk menghindari perilaku pejabat yang mengelola keuangan daerah dari ketidak jujuran, penyelewengan, kebocoran anggaran dan korupsi. Dengan adanya pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan, maka penyajian laporan keuangan dapat memenuhi karakteristik kualitatif pokok yaitu keandalan.

Komitmen organisasi merupakan tingkat sejauh mana setiap karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan- tujuannya, serta berniat mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Dengan adanya komitmen yang kuat pada setiap pegawai dalam mengelola keuangan, maka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu menyajikan informasi yang andal dalam bentuk laporan keuangan.

**Faktor yang dapat memberikan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu pemanfaatan dari teknologi informasi<sup>2</sup>.** Teknologi Informasi (TI) merupakan gambaran dari setiap teknologi yang membantu manusia dalam berkomunikasi, menyimpan, memanipulasi, menghasilkan, dan menyebarkan informasi. (Arad, Hamed dan Hoda Arad, 2009). Pemanfaatan dari teknologi informasi yaitu mampu memberikan kecepatan dalam memproses transaksi dan menyiapkan laporan serta keakuratan dalam perhitungan. Dari sisi akuntansi peningkatan total volume Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan luar biasa serta

---

<sup>2</sup> Eristanti, Baiq., dkk. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan. Vol. 1(2) : hal. 91-104. Mataram.

menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks harus diikuti dengan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah.

Selain itu pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor yang berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Trisyahputra (2013) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan. Namun berbeda dengan hasil penelitian Anggraeni (2014) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap andalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor belum meratanya semua wilayah dalam penggunaan internet dan komputer sehingga sangat berdampak terhadap kinerja pegawai dalam menjalankan tugasnya.

Faktor lain yang mempengaruhi keandalan laporan keuangan yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor penting bagi perusahaan. Sumber daya manusia adalah kemampuan pemilik/manajer dalam melaksanakan fungsi manajerialnya secara efisien (Yudianta dan Ni Made, 2011; Andriani, 2010; Winidyaningrum, 2010). Keandalan laporan keuangan pemerintah daerah juga tidak terlepas dari pengaruh sumber daya yang mampu memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Pemerintah daerah harus memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta mampu memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi para stakeholder.

Hasil penelitian Nasution (2019) menunjukkan bahwa sumber daya manusia ternyata menentukan keandalan pelaporan keuangan daerah. Dinamika

perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan pelaporan keuangan daerah ternyata mampu diantisipasi oleh pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Kemampuan ini terjadi karena sumber daya manusia, terutama pada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK telah siap untuk mendukung pengelolaan pelaporan keuangan daerah secara andal.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut apakah faktor-faktor yang mendasari keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Maka peneliti tertarik mengambil judul “**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Intern terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
2. Bagaimana pengaruh penerapan pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah Daerah?
3. Bagaimana pengaruh penerapan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian studi literatur ini yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan Sistem Pengendalian Intern

terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Untuk mengetahui penerapan pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap keandalan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui penerapan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap keandalan laporan keuangan keuangan pemerintah daerah.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berdasarkan tujuan penelitian diatas adalah :

- 1 Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

- 2 Bagi Peneliti selanjutnya

Sebagai referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian dengan tema yang berkaitan untuk penelitian selanjutnya.

- 3 Bagi Akademis

Secara Akademis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan teori, khususnya mengenai pelaporan keuangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman serta dijadikan sebagai referensi, bahan diskusi, dan bahan kajian lanjut bagi pembaca tentang hal yang berkaitan dengan faktor keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori Keagenan merupakan teori yang menyatakan bahwa secara umum hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (principal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama principal. Dalam akuntabilitas publik, pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan suatu pertanggungjawaban dari segala aktivitas dan kegiatan kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Sudut perspektif akuntansi sektor publik dalam pemerintah merupakan pemerintahan sebagai agen yang memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel bagi pengguna informasi laporan keuangan pemerintah atau stake holder dalam perannya sebagai principal yang berhak membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik dan menilai akuntabilitas. **Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.**<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Farida H. Palenga, 2017. Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah). E-Journal Katalogis, Volume 5, Nomor 11, hal. 172-173.

### 2.1.1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah istilah yang sangat erat hubungannya dengan ilmu akuntansi dan manajemen, secara mendasar akuntabilitas diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban, seperti yang dijelaskan oleh Purnomo berikut ini :

**Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab, menerangkan kinerja, dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban<sup>4</sup>**

Akuntabilitas adalah prinsip yang selalu diterapkan oleh seorang akuntan dalam menjalankan tugasnya. Prinsip ini juga harus dipegang erat oleh perusahaan agar setiap karyawannya dapat menjalankan tugas dengan baik sehingga tujuan bisnis mudah tercapai.

Prinsip-prinsip akuntabilitas adalah:

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan organisasi yang memiliki nilai akuntabel.
2. Merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

---

<sup>4</sup>) Budi S. Purnomo & Cahaya Putri, 2018. Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Volume 6, Nomor 3, hal. 468.

4. Berorientasi pada visi, misi, hasil, dan manfaat yang diperoleh organisasi.
5. Memegang erat nilai kejujuran, transparan, objektif dan inovatif.

Akuntabilitas dapat dibagi menjadi 2 bagian tergantung konteks yang sedang dipakai yaitu :

1. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal adalah sebuah kondisi di mana seseorang mampu mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil kepada jabatan otoritas di atasnya.

Misalnya saja akuntabilitas kepala dinas kepada walikota, kepala cabang kepada direktur, atau menteri kepada presiden.

2. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horinzontal adalah tanggung jawab organisasi terhadap masyarakat dan lingkungan eksternalnya yang tidak ada hubungan antara atasan dan bawahan.

Tanggung jawab di sini biasanya berhubungan erat dengan penyelesaian tugas pada pelayanan publik.

### **2.1.2. Transparansi**

Transparansi yaitu informasi keuangan daerah harus mampu menyajikan dan menyediakan informasi yang terbuka serta mudah diakses

dan dipahami oleh semua pihak sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan akuntabel yaitu pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti yang diungkapkan oleh Annisa dalam Patras Thebora bahwa **Transparansi diperlukan agar demikian masyarakat umum dan komunitas bisnis dapat mengawasi pelaksanaan negara secara obyektif**<sup>5</sup>.

Apalagi prinsip dasar pertanggungjawaban berisi unsur penjelasan di dalam fungsi organisasi dan bagaimana mengatasinya mereka. Untuk itu, setiap pejabat negara harus melakukannya menjalankan tugasnya dengan jujur dan terukur sesuai dengan hukum dan peraturan dan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu kepala sekolah pedoman pelaksanaan akuntabilitas adalah laporan pertanggungjawaban diserahkan secara teratur sesuai dengan peraturan.

### **2.1.3. Pelaporan Keuangan Daerah**

Laporan keuangan daerah merupakan suatu bentuk laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap tuntutan publik atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Dalam menyusun laporan keuangan, pemerintah daerah harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010.

**Dilihat dari sisi internal organisasi, laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan**

---

<sup>5</sup> Patras Thebora, Jenny Morasa dan Sintje Rondonuwu, 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPK-AD Kantor Walikota Manado. Jurnal Riset Akutansi Going Concern. Volume 12, Nomor 2, hal. 577

**organisasi sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai dasar untuk mengambil keputusan<sup>6</sup>.**

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

#### **2.1.4. Keandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah**

Laporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Laporan Keuangan hanyalah salah satu medium dalam penyampaian informasi keuangan tersebut. Laporan Keuangan pada dasarnya adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Adapun laporan keuangan pokok yang harus disusun oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI meliputi: (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasi, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan

---

<sup>6</sup> Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI

Perubahan Ekuitas, (7) Catatan atas Laporan Keuangan.

**Keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi dalam laporan keuangan harus andal, yakin bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi<sup>7</sup>.**

Laporan keuangan dikatakan andal (*reliable*) jika laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material dan disajikan secara tulus dan jujur. Pelaporan keuangan yang andal apabila dalam penyajiannya terdapat fakta-fakta secara jujur dan relevan serta dapat diverifikasi atau proses menentukan kebenaran laporan keuangan.

Agar informasi dapat diandalkan maka informasi tersebut harus disajikan dengan :

- a. Penyajian jujur, berarti informasi yang dihasilkan dapat dipercaya. Informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan harus disampaikan secara jujur di setiap transaksi atau peristiwa lainnya dan disajikan secara wajar.
- b. Laporan keuangan harus substansial, artinya informasi akuntansi yang ada dalam laporan keuangan harus disampaikan sesuai transaksi dan peristiwa lainnya dengan substansial dan realitas ekonomi, bukan hanya bentuk hukumnya.
- c. Laporan keuangan sebagai pertimbangan sehat, artinya informasi akuntansi yang disajikan harus berguna dalam menghadapi

---

<sup>7</sup> Miharja, Ben, dkk. 2020. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat*. Indonesia Accounting Journal. Vol. 2 No. 2 : hal. 148-161. Mataram.

ketidakpastian ekonomi karena pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian dalam melakukan perkiraan.

- d. Netralitas, artinya informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak ada informasi yang menguntungkan beberapa pihak, yang akan merugikan pihak yang memiliki kepentingan yang berlainan (harmony.com).

Ketepatanwaktuan merupakan penyajian penyajian informasi yang sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan. Apabila informasi yang diterima oleh pengguna laporan keuangan tidak tepat waktu, maka informasi tersebut tidak memiliki nilai. Akibatnya, akan berdampak dalam proses pengambilan keputusan.

#### **2.1.5. Pengendalian Internal terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

**Sistem Pengendalian Internal mendefinisikan Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik<sup>8</sup>.** Pengawasan internal berfungsi melakukan penilaian independen atas

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia. 2008. *Sistem Pengendalian Internal*. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Jakarta

pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sebagai pengawas internal, Inspektur Daerah yang bekerja dalam organisasi pemerintah yang ditetapkan oleh manajemen puncak (Kepala Daerah) telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana, menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap keekayaan daerah, menentukan efisien dan efektivitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah, serta yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai Unit/Satuan Kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi Pemerintah Daerah.

Yanto (2019) menyatakan dengan adanya sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara baik dan menyeluruh dalam pemerintahan dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan.

#### **2.1.6. Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Teknologi informasi adalah sistem berbasis IT (Ilmu Teknoligi) yang digunakan untuk mengolah data dalam memproses, menyusun dan menyimpan data untuk menghasilkan informasi yang releva dan akurat yang digunakan untuk mpengambilan keputusan. Teknologi informasi meliputi komputer, perangkat lunak, database, jaringan, dan jenis teknologi laiannya. Teknologi informasi menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data sesuai dengan kebutuhan dan digunakan agar data dapat diakses secara global. Pemanfaatan teknologi mencakup pengolahan data, pengolahan imformasi dan proses kerja secara elektronik agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah oleh masyarakat sehingga dalam pemanfaatan teknologi

informasi dalam akuntansi mampu menciptakan laporan keuangan yang andal dan cepat, serta memiliki keakuratan data. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Perkembangan teknologi tidak hanya dimanfaatkan pada suatu organisasi bisnis tetapi pada organisasi dibidang sektor publik. Sistem informasi dalam akuntansi masih mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data.

Anggraeni (2014) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap andalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Namun berlawanan dengan penelitian Trisyahputra (2013) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan. Perbedaan ini disebabkan kabupaten aceh timur belum dapat memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal, hal ini di sebabkan faktor belum meratanya semua wilayah dalam penggunaan internet, dan komputer singga sangat berdampak terhadap kinerja pegawai dalam menjalankan tugasnya. Teknologi informasi berguna sebagai pemrosesan dan penyimpanan informasi sekaligus berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Teknologi informasi digunakan oleh sektor publik saat ini untuk memproses berbagai informasi keuangan dan non keuangan yang nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Teknologi informasi

hendaknya terintegrasi/terpadu, menjamin kebutuhan terhadap kualitas data.

#### **2.1.7. Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

**Kualitass sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisai (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien<sup>9</sup>.** Kualitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outpus) dan hasil-hasil (outcomes). Pemerintah daerah sangat membutuhkan sumber daya manusia yang profesional dengan wawasan yang luas, memiliki kompetensi dibidangnya dan memiliki jiwa berkompetensi yang sportif. Sumber daya manusia yang professional akan mampu menyelesaikan tugas dan pekerjaannya secara tuntas, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten dalam bidang akuntansi (keuangan) menjadi penyangga utama untuk dapat tersusun laporan keuangan yang berkualitas.

Sukirman (2012) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif sumber daya manusia terhadap keandalan pelaporan keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia ternyata menentukan keandalan pelaporan keuangan daerah.

---

<sup>9</sup> Zuliarti. 2012. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi. Universitas Muria Kudus.

## 2.2. Peneitian Terdahulu

Tabel. 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Eristanti (2018)	Faktor-faktor yang mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian menyatakan bahwa komitmen organisasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan
2.	Yanto (2019)	Faktor-faktor yang mempengaruhi Keandalan Nilai Informasi Keuangan Pemerintah Daerah	Berdasarkan hasil penelitian, masing-masing variabel yaitu variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, pengawasan keuangan daerah dan komitmen organisasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap keandalan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

3.	Yuliani (2016)	Faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan pengendalian intern tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4.	Chodijah (2018)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. 2. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

5.	Rachmawi (2016)	Faktor-faktor yang mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia	Berdasarkan hasil uji regresi logistik (logistic regression) menunjukkan bahwa faktor kemandirian daerah, lokasi daerah, opini audit dan temuan audit pemerintah daerah berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah di Indonesia. Berdasarkan hasil uji regresi logistik (logistic regression) menunjukkan bahwa faktor keterpilihan kembali kepala daerah, posisi dan performa keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah di Indonesia.
----	-----------------	---	---

6	Andry Trisaputra	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	<p>1. Pemanfaatan teknologi informasi signifikan positif terhadap ketepatan waktuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat</p> <p>2. Pengawasan keuangan daerah signifikan positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.</p>
7	Dian Hajra	Faktor-faktor yang mempengaruhi Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo	1. Penelitian ini membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia dan standar akuntansi pemerintah berpengaruh berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Wajo.

			<p>2. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wajo Hal ini mungkin disebabkan karena Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Wajo kurang dalam memaksimalkan sistem komputer yang terintegrasi sehingga berdampak terhadap kinerja dalam menjalankan tugasnya.</p>
8	Een Samawati Miharja	Faktor-faktor yang mempengaruhi Keandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	<p>Kualitas sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi, dan pengawasan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebaliknya penelitian ini menemukan bahwa seluruh variabel independen tidak signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan</p>

			Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
9	Patras Thebora, Jenny Morasa dan Sintje Rondonuwu	Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPK-AD Kantor Walikota Manado	<p>1. Kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan di BPK-AD Kantor Walikota Manado.</p> <p>2. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan di BPK-AD Kantor Walikota Manado.</p> <p>3. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan di BPK-AD Kantor Walikota Manado.</p> <p>4. Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan di BPK-AD Kantor Walikota Manado.</p>

10	Febrian Cahyo Pradono	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Faktor yang mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan	<p>Faktor utama penyebab belum baiknya kualitas laporan keuangan SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah belum optimalnya implementasi sistem pengendalian internal, bahkan masih banyak SKPD yang belum memiliki petunjuk teknisnya.</p> <p>Faktor yang mendukung baiknya kualitas laporan keuangan SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah pelaksanaan rekonsiliasi yang rutin di setiap SKPD.</p>
----	--------------------------	--	--

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. **Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian**<sup>10</sup>. Studi literatur ini dimaksudkan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan kualitas audit dan manajemen laba dan penelitian ini bertujuan untuk mencari dasar pijakan atau fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan dengan sementara atau disebut juga dengan hipotesis penelitian.

##### **3.1.1. Studi Literatur**

*Literature review* merupakan hal yang penting dalam penelitian kualitatif. Kegiatan ini berkaitan dengan telaah atas teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena dan telaah penelitian sebelumnya untuk menunjukkan keterkaitan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan yang telah dilakukan (Chariri, 2009). Secara umum studi literatur ini digunakan untuk menyelesaikan suatu fenomena atau permasalahan dengan

---

<sup>10</sup> Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.

menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Studi literatur ini juga sering dikenal dengan sebutan studi pustaka. Dalam penelitian ini tentunya peneliti harus memiliki wawasan yang luas serta informasi yang akurat mengenai topik yang akan diteliti.

### **3.2. Metode Pengumpulan Data**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka. Data yang digunakan berasal dari textbook, journal, artikel ilmiah, literature review yang berisikan tentang konsep yang diteliti kemudian data yang diperoleh dikompulsi, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai studi literatur.

### **3.3. Sumber Data**

Dalam pengumpulan data penelitian, penelitian menggunakan data Sekunder. Data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter.

### **3.4. Analisis Data**

Memulai dengan materi hasil penelitian yang secara sekuensi diperhatikan dari yang paling relevan, relevan dan cukup relevan. Cara lain dapat juga, misalnya dengan melihat tahun penelitian diawali dari yang paling mutakhir, dan berangsur-angsur mundur ke tahun yang lebih lama. Membaca

abstrak dari setiap penelitian lebih dahulu untuk memberikan penilaian apakah permasalahan yang dibahas sesuai dengan yang hendak dipecahkan dalam penelitian. Mencatat bagian-bagian penting dan relevan dengan relevan dengan permasalahan penelitian. Untuk menjaga tidak terjebak dalam unsur plagiat, para peneliti hendaknya juga mencatat sumber-sumber informasi dan mencantumkan daftar pustaka. Jika memang informasi berasal dari ide atau hasil penelitian orang lain. Membuat catatan, kutipan, atau informasi yang disusun secara sistematis sehingga penelitian dengan mudah dapat mencari kembali jika sewaktu-waktu diperlukan.

